



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/PRT/M/2015 DI KECAMATAN KINTAMANI

Ni Luh Putu Suastini

FISIP Universitas Ngurah Rai Denpasar

Suastini@gmail.com

Informasi Artikel

Kata Kunci;
Implementasi,
Peraturan Menteri,
Bantuan Stimulan
Perumahan
Swadaya.,.

Abstrak

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan social kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima manfaat bantuan stimulant untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya.

Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39/PRT/TM/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perumahan Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Kintamani dan Kabupaten Bangli pada umumnya. Sehingga kedepannya tujuan akhir yaitu peningkatan kesejahteraan daripada masyarakat penerima BSPS.

Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi BSPS secara bertahap menurunkan jumlah rumah tidak layak huni yang ada di kecamatan Kintamani Proses Implementasi tidak dirumuskan secara sksplisit namun prosesnya dapat dilihat dalam pelaksanaan dari tahun ketahun. Adapun proses implementasi BSPS di Kecamatan Kintamani adalah sebagai berikut : Pertama proses usulan BSPS oleh Bupati yang dilampiri dengan proposal BSPS dengan telah melampirkan calon penerima dengan BNBA (By Name Adreas), Tahap kedua, Penetapan Penerima, Sosialisasi, Pembenukan KPB serta Penunjukan Toko Penyedia Bahan Bangunan, Tahap Ketiga Pendistribusian Bahan Bangunan, Pentransperan Dana, Pembangunan dan Pelaporan 30% dan 100% kegiatan BSPS

(catatan : tolong diringkas menjadi maksimal 200 kata)

Abstract

Self-Help Housing Stimulant Assistance is a government facilitation in the form of social assistance to low-income people (MBR) beneficiaries of stimulant assistance to assist in the implementation of self-help housing development. The implementation of the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 39/PRT/TM/2015 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Housing Number 06 of 2013 concerning Guidelines for the Implementation of Independent Housing Stimulant Assistance (BSPS) is an effort to meet the basic needs of the community, especially those in Kintamani District and Bangli Regency in general. So that in the future the ultimate goal is to improve the welfare of the BSPS recipient community. The findings in the field show that the implementation of BSPS gradually reduces the number of uninhabitable houses in Kintamani sub-district. The implementation process is not formulated in a sparse manner but the process can be seen in the implementation from year to year. The BSPS implementation process in Kintamani District is as follows: First, the BSPS proposal process by the Regent which is attached to the BSPS proposal by having attached the prospective recipient with BNBA (By Name Address), the second stage, Determination of Recipients, Socialization, Cultivation of KPB and Appointment of Building Material Provider Stores, Third Stage of Distribution of Building Materials, Transfer of Funds, Development and Reporting of 30% and 100% of BSPS activity

Keyword;

**Implementation,
Ministerial
Regulation,
Independent Housing
Stimulant
Assistance.;**

PENDAHULUAN

Pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok yaitu keterbatasan penyediaan rumah yang tidak layak huni dan lingkungan kumuh yang makin meluas. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam dan permukiman adalah: (1). Keterbatasan penyediaan rumah, (2). Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh sarana dan prasarana dan fasilitas umum yang memadai, (3). Permukiman kumuh yang semakin meluas.pembangunan perumahan. Permasalahan pokok diatas disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya (a). Regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman, (b). Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan, (c). Lemahnya kepastian bermukim, (d). Belum tersedianya dana murah untuk jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, (e). Belum efesien pasar primer dan belum berkembang pasar skunder perumahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dengan adanya program tersebut diatas rumah tangga yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sektor perumahan dengan mekanisme pelaksanaan diatur melalui kementerian melihat fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peumahan Rakyat Nomor 39/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Kintamani.

I. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan indentifikasi permasalahan di atas, maka perumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penanganan rumah tidak layak huni yang ada di Kecamatan Kintamani yang bersumber dana dari pemerintah pusat dalam bentuk bantuan stimulan perumahan swadaya diantaranya :

1. Bagaimanakah implementasi penanggulangan kemiskinan pada sektor perumahan di Kecamatan Kintamani yang berdasarkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2017-2018?
2. Apakah dampak dari pelaksanaan Program Bantuan Stimulam Perumahan Swadaya Di Kecamatan Kintamani 2017-2018?

II. Landasan Teori

Pendekatan Meriee S. Grindle dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Procces. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :
 - a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
 - b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - a) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok

- b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi
 - 2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :
 - Isi Kebijakan (*Content of Policy*) yang mencakup tentang :
 - a) *Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)
 - b) *Type of Benefits* (Tipe Manfaat)
 - c) *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)
- Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai.
- a) *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan)
 - b) Program Implementer (Pelaksana Program)
 - c) *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan metodologi kualitatif, metode ini dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat pospositivisme. Menurut Nasution (2008:5), "Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya".

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif (*interaktif model of analysis*). Seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) Analisis ini menggunakan metode interaktif yang mempunyai 3 komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Merilee S. Grindle proses implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel saling berhubungan satu sama lainnya, begitu halnya dengan implementasi BSPS sudah tentunya dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Isi Kebijakan, mencakup:

Sasaran dalam isi kebijakan yang ditujukan dalam implementasi bantuan stimulan perumahan swadaya adalah masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni namun masyarakat tersebut mampu berswadaya.

- a. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran adalah akan tercerminnya rumah layak huni dan memenuhi standar kesehatan. Dengan dana yang minim dari masyarakat tidak akan mungkin untuk membangun sebuah hunian yang layak huni dan memenuhi standar kesehatan dengan adanya program bantuan stimulan perumahan swadaya masyarakat mendapat bantuan dari pemerintah sehingga mencukupi untuk membangun rumah yang layak huni, dan mencerminkan kesehatan lingkungan.
- b. Perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan adalah terpenuhinya standar rumah layak huni mengingat tujuan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya adalah mengubah rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni sehingga masyarakat

bisa merasakan kenyamanan di dalam hunian sehingga program ini mampu tuntaskan rumah tidak layak huni di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

- c. Letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan yaitu apabila usulan yang diusulkan oleh bupati disepakati oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat lewat Direktur Jendral Kementian PUPR menetapkan lokasi dari pada batuan stimulan perumahan swadaya tersebut akan diimplementasikan. Setelah disepakati selanjutnya ditunjuk Tenaga Fasilitator untuk melakukan verifikasi ke lapangan guna memastikan apakah dari usulan yang diusulkan memenuhi kreteria untuk mendapatkan program bantuan stimulan perumahan swadaya.
- d. Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya harus dilaksanakan dengan kopeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan yaitu dalam pelaksanaan bantuan stimulant perumahan swadaya yang berwenang menetapkan masyarakat yang akan mendapatkan bantuan adalah Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat berdasarkan usulan yang diusulkan oleh bupati yang kemudian dilakukan verifikasi kelapangan apakah masyarakat tersebut layak mendapatkan bantuan atau tidak. Dan masyarakat berpenghasilan rendah tersebut sanggup menerima bantuan tersebut dengan persyaratan yang telah ditentukan yaitu maudan mampu berswadaya sehingga terlaksananya program bantuan stimulan perumahan swadaya ini dengan baik.
- e. Program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan dar suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkwalitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari temuan hasil penelitian dan pembahasan temuan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perumahan merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi di samping sandang dan pangan, maka sebab itu pemerintah baik pusat dan daerah berkewajiban membantu bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maka dengan adanya program prioritas yang berbasis stimulan di harapkan masyarakat bisa bersubsidi dalam pemanfaatan bantuan. Gambaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sector perumahan di kecamatan yang berdasarkan pelaksanaan BSPS belum berjalan secara efektif sebab masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan karena minimnya anggaran yang ada dan banyaknya RTLH yang ada di Kecamatan Kintamani.

2. Saran

Berdasarkan dari temuan hasil penelitian, pembahasan hasil temuan penelitian dan simpulan diatas dapat diberikan saran sebagai berikut:

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bangli dalam pelaksanaan daripada BSPS menggunakan prinsip tuntas desa, tuntas kecamatan dan tuntas kabupaten dan yang sudah berjalan efektif dalam menurunkan jumlah RTLH namun permasalahan terkait dengan RTLH sudah pastinya terus akan berkembang sejalan dengan perkembangan penduduk dan tingkat kemiskinan yang nantinya jangan sampai dengan adanya prinsip tuntas desa, tuntas kecamatan dan tuntas kabupaten menyebabkan masyarakat yang masih

mempunyai RTLH tidak tersentuh bantuan perumahan sehingga kedepannya disarankan untuk dapat dilakukan evaluasi dan review terhadap data RTLH yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Sandi Nugroho, 2014 Manajemen Strategi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk, Universitas Negeri Surabaya.
- Agustino, L. 2006 *Politik dan Kebijakan Publik*, Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Agustino, L. 2006 *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : Aldi Bandung Pusat KPEW Lemit UNPAD
- Arsyad, L.1992 *Memahami Masalah Kemiskinan di Indonesia*, Suatu Pengantar. Yogyakarta,JEBI No.1 Tahun VII Fakultas Ekonomi UGM
- Chalid, P. 2006. *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka.
- Dunn, W.2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua, Jogjakarta, Penerbit Universitas Gajah Mada.
- Dye R. T. 2008. *Understanding Public Policy*. Pearson Education' Upper Saddle River' New Jersey.
- Frank, A.G.1984. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta,Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Fatmawati, Nurul Handayani Kusuma Wardani, 2010 *Tingkat Keberhasilan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan di Kabupaten Sragen*, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi kebijakan dan politik*. Bandung : PT . Mutiara Sumber Widya.
- Kismartini,dkk.2007 . *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta, penerbit universitas terbuka.
- Lubis, Dj. 2004. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional*. Jakarta, TKP3 KPK Kementrian koordinator bidang kesejahteraan rakyat.
- Mubyarto. 1996. *Kaji tindak program IDT*. Badan perencanaan pembangunan nasional, Yogyakarta, penerbit Aditya Media.

- Mustopadidjaja, A.R. 1992. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, Formulasi Implementasi dan Evalulasi Kinerja . Jakarta, Penerbit LAN.
- Ruli, Khusnu Rizka, 2010. *Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah tidak layak huni kota Surakarta*. Universitas sebelas Maret Surakarta.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung : Remaja Rosdakarya offset.
- Subarsono, AG, 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung.
- Sunggono,1984.*Pengantar Administrasi Publik*,Modul Matrikulasi,MAP-UGM, Yogyakarta.
- Tanaya,Sura Adi, 2012, *Analisis Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)*, Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945.
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, 2011. Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Provinsi Bali.
- Tim Nasional Percepatan Penaggulan Kemiskinan,2011, Panduan Penanggulangan Kemiskinan, Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, Jakarta.
- Umar, H. 2007. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, S. A. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.
- Widodo, Joko, 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang PROPENAS.

Undang-undang nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Peningkatan
Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39/PRT/M/2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

BAPPENAS. 2007. Jaringan Pengaman Sosial. Kementrian Perencanaan Pembangunan
Nasional.

BAPPENAS. 2011. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011.
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional.